

## **BAB I**

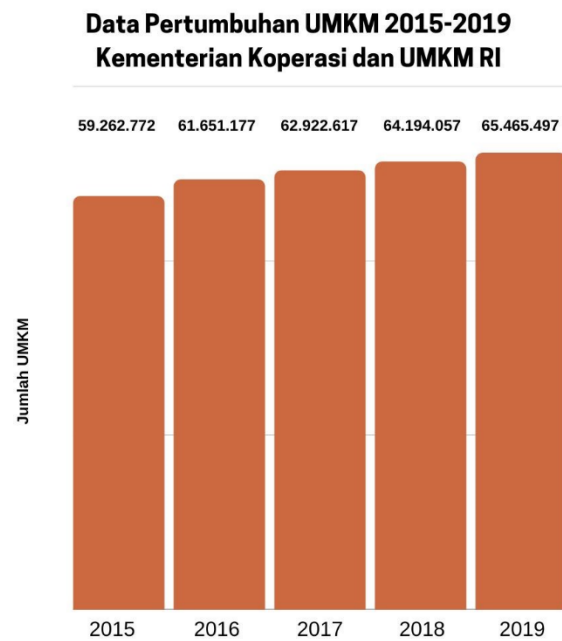
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang sudah tercantum dan diatur dalam undang-undang. Kehadiran UMKM di Indonesia sangatlah penting karena berpotensi dalam meningkatkan perekonomian negara dan penyerapan tenaga kerja sehingga hal ini berdampak pada penekanan angka pengangguran di Indonesia. UMKM juga mempunyai peran penting ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 dan pada masa-masa terjadinya Covid-19 (Kemenkeu, 2022). Dengan banyaknya dampak positif mengenai keberadaan UMKM di Indonesia maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementrian KUKM), pertumbuhan UMKM di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19 pertumbuhan UMKM cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan terjadi ketika triwulan II, namun karena kondisi masih belum pulih penurunan berlanjut hingga triwulan III dan IV (Sasongko, 2020).

Gambar 1.1  
Data Pertumbuhan UMKM 2015-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI 2020

Pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% setara dengan Rp8.573,89 triliun. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa UMKM mampu melakukan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari total Angkatan kerja dan mampu mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia (Limanseto, 2021). Hasil tersebut menunjukkan adanya peran yang sangat penting dari sektor UMKM dalam perekonomian negara. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penciptaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil dari analisis data ini. Data yang menunjukkan bahwa UMKM mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi menunjukkan bahwa sektor UMKM menarik minat investor. Ini dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis UMKM yang lebih besar, inovasi, dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang melibatkan UMKM. Tidak hanya itu, data ini dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan terkait bahwa pentingnya mendukung dan mengembangkan sektor UMKM di Indonesia agar perekonomian dapat bertumbuh dan berlanjut melalui program-program yang sudah dicanangkan untuk UMKM.

Walaupun pertumbuhan UMKM di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, apalagi dari data Kementerian KUKM tahun 2021 yang menjelaskan bahwa UMKM Indonesia telah menyerap sebanyak 97% tenaga kerja, dan dapat menyumbang sebanyak 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta berkontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 14,4% ternyata masih tertinggal dari negara-negara di ASEAN lainnya. UMKM Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan Negara Singapura yang telah berhasil melakukan ekspor nasional sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, Myanmar 23,7%, dan Vietnam dengan angka 18,7% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian yaitu M. Rudy Salahuddin pada siaran persnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi

meminta agar memberikan dorongan kepada 30 juta pelaku UMKM agar dapat *go digital* di tahun 2024 mendatang (Limanseto, 2021).

Banyak faktor yang melatarbelakangi ketertinggalan UMKM Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya. Yunita Resmi Tari sebagai Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) memaparkan terkait identifikasi masalah dan tantangan UMKM yang dihadapi Indonesia. Identifikasi yang pertama, bahwa UMKM Indonesia harus mampu mempertahankan/meningkatkan ekosistem digital. Kedua, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktifitas produk UMKM agar dapat menjadi supplier untuk perekonomian dan perdagangan secara global. Karena UMKM Indonesia berpotensi untuk terus meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktifitas. Ketiga, perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM. Sejauh ini hanya terdapat 25% UMKM yang memiliki akses keuangan. Keempat, kesadaran terhadap adanya ancaman global. Sehingga UMKM Indonesia perlu melakukan proses yang ramah lingkungan dalam setiap proses produktifitas yang dilakukan (Gabriela, 2023).

Dari keempat tantangan tersebut terlihat permasalahan yang cukup serius yaitu fakta bahwa hanya 25% UMKM di Indonesia yang memiliki akses keuangan. Tentu sangat memprihatinkan, karena pelaku UMKM harus paham dan menggunakan produk/layanan keuangan sebagai salah satu penunjang proses produktifitas maupun dalam hal distribusi produk yang dihasilkan. Permasalahan tersebut dapat muncul apabila pelaku UMKM kurang pemahaman dan

pengetahuan mengenai keuangan, ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, dan proses pencairan pembiayaan dengan persyaratan yang rumit.

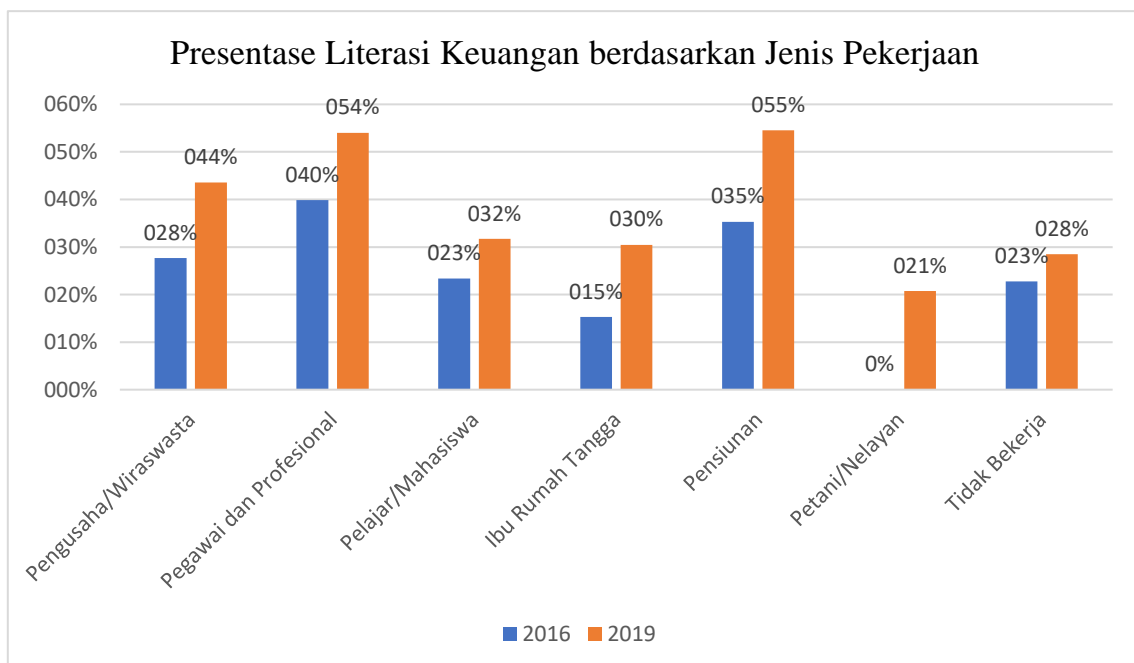
Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dan cepat oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dapat dimulai dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada UMKM, mendorong lembaga keuangan mikro, kebijakan dukungan untuk UMKM, dan digitalisasi keuangan. Dari banyaknya lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan ini, terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan penting dalam memberikan edukasi kepada pelaku UMKM (OJK, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang mempunyai peran penting untuk menjaga stabilitas dan perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, OJK menjadi jembatan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dalam proses produktifitas dan melakukan akses keuangan dengan mudah. OJK juga menjembatani antar lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank dengan pelaku UMKM (Graham & Craig B. Fryhl, 2011). Dengan adanya dorongan kepada lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi peluang dan dampak positif kepada UMKM untuk dapat terus mengembangkan usahanya. Sehingga sangat penting dilakukan peningkatan literasi dan inklusi dengan penerapan kebijakan dan program yang efektif.

Literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan dikategorikan untuk tingkat literasi di Indonesia tergolong *well*

*literate*. Kondisi ini terjadi ketika masyarakat paham terkait lembaga jasa keuangan beserta produk/jasa yang dimilikinya, termasuk kebermanfaatannya dan peluang risiko dari produk lembaga keuangan tersebut. Jika dilihat dari beberapa klasifikasi berdasarkan pekerjaan, tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan. Bahkan untuk pensiunan meningkat drastis dari yang awalnya 35,30% menjadi 54,46% (OJK, 2019).

Gambar 1.2  
Indeks Literasi berdasarkan Pekerjaan

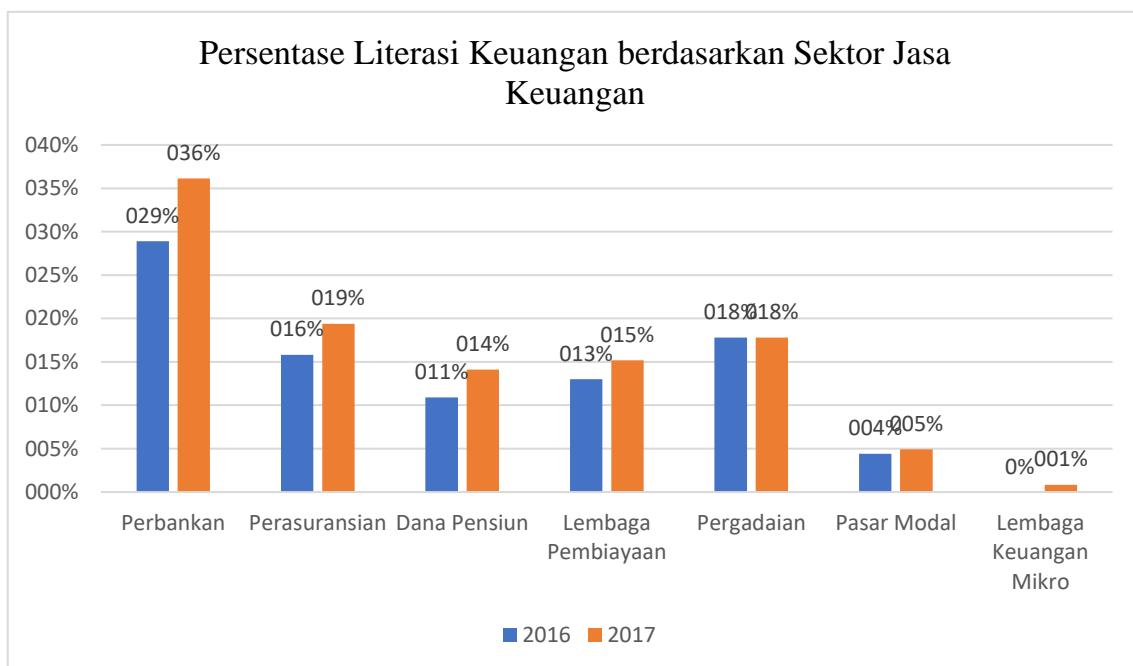


Sumber: SNLKI 2021-2025

Apabila dilihat dari sumber Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025 OJK (2019) mengenai sektor jasa keuangan, indeks literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Literasi keuangan terbanyak diperoleh dari sektor jasa keuangan perbankan dimana

mencapai angka 28,90% pada tahun 2016, dan 36,12% pada tahun 2019. Kemudian untuk indeks literasi keuangan terendah pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu 0,85% pada tahun 2019.

Gambar 1.3  
Indeks Literasi berdasarkan Sektor Jasa Keuangan



Sumber: SNLKI 2021-2025

Sektor jasa keuangan perbankan mendominasi daripada sektor jasa keuangan lainnya. Produk maupun layanan jasa keuangan perbankan yang paling familier di kalangan masyarakat tahun 2019 yaitu tabungan, transfer, BPJS Jaminan Kesehatan, deposito, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan untuk produk/layanan keuangan yang masih kurang dimengerti oleh masyarakat di Indonesia yaitu sewa/ijarah pada bank (SDB), pembiayaan BWM dan Umi, giro wadiah/mudharabah, dan *fintech-crowdfunding* (OJK, 2019).

Adanya peningkatan literasi keuangan ini akan berkaitan erat terhadap peningkatan inklusi keuangan. Menurut Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tahun 2016 menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses dari berbagai lembaga, layanan, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan. Peningkatan literasi yang seimbang dengan peningkatan inklusi maka akan menghasilkan dampak positif terhadap UMKM itu sendiri. Namun, apabila literasi keuangan lebih kecil dibandingkan tingkat inklusi keuangan akan menghasilkan gap yang tidak ideal. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan risiko. Dengan adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan tersebut dikhawatirkan pelaku UMKM berisiko membuat keputusan keuangan yang salah dan akan merugikan usahanya sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ayuk & Marta (2019) mengenai pengaruh literasi dan inklusi keuangan (studi kasus UMKM di Kabupaten Gianyar) bahwa tingkat literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan pada usaha UMKM di Kabupaten Gianyar. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Wuryani (2020) mengenai inklusi keuangan, bahwa akses keuangan yang mudah menjadi salah satu penunjang kesuksesan usaha UMKM.

Fajri et al. (2021) memperkuat argumen mengenai pengaruh literasi dan inklusi keuangan sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa tingkat pendidikan juga berpengaruh pada kinerja



UMKM. Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai kinerja dan keberlangsungan suatu UMKM perlu dilakukan penelitian terhadap beberapa variable lain, seperti pemasaran, teknologi, dan manajemen.

Seperti pada penelitian Hilmawati & Kusumaningtias (2021) mengenai pengaruh literasi dan inklusi terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Surabaya dengan melalui sampling 113 responden UMKM melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menghasilkan jawaban bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Surabaya. Sedangkan literasi berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Surabaya.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan ternyata dapat berpengaruh maupun tidak berpengaruh dalam mendorong keberlangsungan dan kinerja UMKM karena setiap daerah mempunyai pengaruh dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, apabila dilihat dari penelitian terdahulu tersebut bahwa peningkatan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku UMKM cukup penting untuk bekal dalam berwirausaha maupun dalam kepentingan lainnya. Hal ini selaras dengan yang dilakukan oleh OJK DIY dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Ngargosari Kulon Progo. Dalam menjalankan tugasnya, OJK DIY dibantu dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kulon Progo pada bulan September 2023. UMKM Kelurahan Ngargosari dipilih menjadi sasaran

EKI dikarenakan adanya potensi yang baik, bahkan di Kelurahan Ngargosari terdapat desa prima yang selalu aktif dalam upaya peningkatan dan pengembangan UMKM. Tidak hanya itu, produk-produk yang dihasilkan dari UMKM di Kelurahan Ngargosari banyak dipajang di Pojok UMKM OJK DIY secara berkala, sehingga apabila program ini dijalankan dengan maksimal maka akan menghasilkan output yang baik, mulai dari kualitas usaha maupun sdmnya.

Program EKI dirancang untuk mempersiapkan langkah progresif terkait akses keuangan khususnya di wilayah perdesaan. Program tersebut dimulai dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Pada tahap pertama, pra-inkubasi dilakukan identifikasi dan pemetaan daerah yang nantinya akan dipilih menjadi sasaran EKI. Tahap kedua, pada tahap inkubasi terdapat beberapa kegiatan yang diberikan kepada pelaku UMKM Ngargosari, seperti sosialisasi terkait produk dan layanan keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan, literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pendaftaran HAKI, pendaftaran P-IRT, sertifikasi halal dan SIBAKUL Jogja. Dan untuk pasca-inkubasi dari program tersebut dilakukan identifikasi capaian peningkatan inklusi keuangan. Diharapkan untuk program EKI dapat menghasilkan output yang baik terhadap masyarakat maupun UMKM dalam mendorong kinerja yang baik (Program EKI OJK, 2023).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui pengaruh literasi dan inklusi program inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) terhadap berlangsungnya UMKM di Kelurahan Ngargosari Kulon Progo maka diperlukan analisis yang lengkap. Sehingga perlu dilakukan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari?
3. Apakah literasi dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian mengenai pengaruh literasi dan inklusi program inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) terhadap berlangsungnya UMKM di Kelurahan Ngargosari Kulon Progo yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kelurahan Ngargosari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan bacaan untuk meningkatkan keilmuan terkait literasi keuangan, kinerja keuangan, dan keberlangsungan UMKM.
2. Bagi pemerintah dan lembaga/otoritas terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan kebijakan sehingga selanjutnya dapat dilakukan perancangan strategi untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam menunjang keberlangsungan UMKM. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait upaya dan program yang telah diberikan kepada masyarakat terkhusus UMKM sudah sesuai target atau masih perlu diperbaiki lagi. Sehingga pihak terkait dapat melakukan upaya yang lebih dan menciptakan program-program yang lebih mendorong keberlangsungan UMKM yaitu dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.